

TAJUK RENCANA

JORR dan Pariwisata Yogya

JOGJA Outer Ring Road (JORR) adalah proyek infrastruktur penting yang dirancang untuk mengatasi masalah kemacetan di Yogyakarta dan sekitarnya. Proyek ini memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, baik dari segi transportasi maupun dampak sosial-ekonomi.

Karena itu memang mau tidak mau, harus diteruyskan meningkat kondisi lalu lintas di Yogya sering macet parah. Terlebih ketika menghadapi libur panjang. Jika kondisi dibiarkan, bukan tidak mungkin akan mengurangi arus wisatawan ke Yogyakarta (KR 3/2). Sebab keluhan parta wisatawan sudah sangat jelas, brtebaran melalui media sosial dan media lainnya.

Yogyakarta sebagai kota wisata menghadapi tantangan kemacetan yang memerlukan solusi terintegrasi.

Salah satu tujuan utama pembangunan JORR adalah untuk mengurangi kemacetan di pusat kota Yogyakarta. Dengan menyediakan jalur alternatif bagi kendaraan yang melintas antar wilayah, JORR akan meminimalkan volume kendaraan yang memasuki area perkotaan. Penelitian menunjukkan bahwa JORR dapat meningkatkan rasio volume terhadap kapasitas (V/C ratio) jalan-jalan di sekitarnya, sehingga mengurangi kemacetan hingga 60% pada beberapa rute.

Pembangunan JORR dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jalan ini akan melintasi beberapa kabupaten, yaitu Bantul, Kulon Progo, dan Sleman, sehingga memfasilitasi pergerakan barang dan orang antara daerah tersebut. Hal ini juga berpotensi mempercepat waktu perjalanan dan meningkatkan efisiensi transportasi.

Pembangunan JORR diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur yang dilalui. Dengan akses yang lebih baik, kawasan-kawasan baru akan lebih mudah dijangkau, menarik investasi, dan menciptakan peluang usaha baru. Gubernur DIY menyatakan bahwa proyek ini akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di sepanjang jalur tersebut.

Meski demikian, pembangunan JORR juga akan mempengaruhi bentuk perkotaan di Yogyakarta. Pemda harus siap, jika kemudian dampak nya akan berpengaruh terhadap bentuk perkotaan. Penelitian menunjukkan bahwa adanya jalan lingkar dapat menyebabkan perambatan urban yang lebih terencana, dengan potensi untuk menciptakan area pemukiman baru yang lebih teratur dan kompak jika disertai dengan intervensi pembangunan yang tepat. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, hal ini bisa menyebabkan penyebaran yang tidak teratur atau "leap-frog" dalam pengembangan area perkotaan.

Dengan mengalihkan lalu lintas berat dari jalan-jalan utama di pusat kota ke jalan lingkar, JORR juga berpotensi mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas. Pengurangan kepadatan kendaraan di jalan-jalan utama dapat memberikan lingkungan yang lebih aman bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum.

Memang pembangunan Jogja Outer Ring Road (JORR) memiliki dampak yang signifikan terhadap bentuk perkotaan di Yogyakarta. Proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga memengaruhi cara perkembangan wilayah di sekitarnya.

Dengan adanya JORR, terdapat kemungkinan peningkatan densitas bangunan dan penduduk di sepanjang jalur jalan tersebut. Namun, tanpa intervensi yang tepat, seperti pengembangan sarana publik dan pengaturan penggunaan lahan, perambatan ini dapat menjadi tidak terencana. Oleh karena itu, intervensi yang berorientasi pada pengembangan pusat-pusat kegiatan dapat membantu mengendalikan perambatan dan meningkatkan kekompakan penggunaan lahan. Pemda DIY harus bersiap diri.

Selain itu berpotensi mengubah penggunaan lahan pertanian di sekitar jalur tersebut. Ketika aksesibilitas meningkat, lahan pertanian mungkin akan dialihfungsikan menjadi area pemukiman atau komersial, yang dapat mengurangi luas lahan pertanian yang tersedia di daerah tersebut. (**)-d

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Lithang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso Ssn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanrkryk23@yahoo.com, iklanrkryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Dampak Pemangkasan Anggaran

Wahyu I Widodo

di salah satu penggerak perekonomian. Ia khawatir pemangkasan anggaran perjalanan dinas justru berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi.

Pengetatan anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat bukanlah kebijakan yang hanya terjadi di Indonesia. Malaysia sejak 2015 membatasi perjalanan dinas dan kegiatan rapat. Thailand mengurangi anggaran perjalanan dinas luar negeri dan rapat tidak mendesak, yang berhasil menghemat 10-15% anggaran. Di Jerman, menerapkan



KR-JOKO SANTOSO

batasan biaya akomodasi dan transportasi bagi pegawai negeri, serta mendorong penggunaan transportasi publik, yang akhirnya mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 10% dalam dua tahun.

Di Indonesia sendiri, kebijakan serupa pernah diterapkan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014-2015. Meski bertujuan untuk efisiensi, kebijakan ini menuai kritik karena dianggap menghambat kinerja instansi pemerintah yang membutuhkan koordinasi lapangan dan rapat intensif.

Dalam jangka pendek, pemangkasan anggaran ini memang berdampak negatif pada sektor pariwisata dan akademik. Namun, jika dikelola dengan baik, penghematan ini dapat dialokasikan ke sektor yang lebih prioritas seperti infrastruktur pariwisata, pen-

didikan, dan kesehatan. Menurut jurnal Kebijakan Rasionalisasi Anggaran oleh Wijaya FK (2019), pemangkasan belanja yang kurang produktif bertujuan untuk mendukung sektor strategis. Namun, kebijakan ini juga menuntut industri yang bergantung pada belanja pemerintah untuk mencari strategi adaptasi agar tetap bertahan.

Meski kebijakan ini mengurangi permintaan dari segmen pemerintah, pelaku industri pariwisata tetap memiliki peluang besar di segmen lain, seperti wisatawan *leisure*, korporasi swasta, dan wisatawan internasional. Hotel, restoran, dan agen perjalanan tidak hanya bergantung pada kunjungan pegawai pemerintah. Namun dengan inovasi dan strategi pemasaran yang tepat, mereka bisa mengembangkan pangsa pasar baru.

Begitu pula bagi akademisi, proyek penelitian pemerintah bukanlah satu-satunya sumber penghidupan. Akademisi memiliki peran utama dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ketergantungan pada proyek riset berbayar atau honorarium sebagai pembicara seharusnya tidak menjadi fokus utama, melainkan bagian dari kontribusi terhadap pengembangan industri dan masyarakat.

Dalam menghadapi kebijakan ini, adaptasi dan inovasi menjadi kunci utama. Industri pariwisata perlu memperluas pasar mereka, sementara akademisi harus tetap fokus pada kontribusi jangka panjang bagi dunia pendidikan dan penelitian. (*)-d

*)**Wahyu I Widodo, Dosen & Pengamat Pariwisata.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pokja Ketahanan Ekonomi dan Akselerasi Keistimewaan

Wahjudi Djaja

PADA 10 Desember 2024 lalu Tim Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mempresentasikan hasil survei Indeks Harmoni Indonesia (IhaI) Kota Yogyakarta. Ada dua hal yang perlu diapresiasi mengingat menjadi pencapaian Badan Kesbangpol DIY. Pertama, Kemendagri sangat mengapresiasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta karena menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang membentuk Kelompok Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik. Kedua, Kota Yogyakarta meraih indeks IhaI 7,5 atau Kategori Sangat Bagus Sekali.

Pokja sebagai Payung Bersama

Kelompok Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesbangpol DIY dibentuk sebagai ruang koordinasi dan akselerasi program pembangunan berkelanjutan yang berdaya saing. Fokus utamanya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan pendekatan pemberdayaan potensi masyarakat. Kata kuncinya kolaborasi dan sinergi, dua istilah yang selama ini mudah diucapkan namun sulit direalisasikan karena menyangkut sejumlah *stakeholder* dan kepentingan. Di dalam Pokja, keduanya benar-benar dipraktikkan melalui serangkaian tahap, mulai sinkronisasi rencana aksi (Renaksi), pemilihan lokasi binaan, sampai eksekusi dan evaluasi di lapangan. Keberhasilan program ini tentu sangat ditentukan respons lurah sebagai partner dan pemilik wilayah.

Model terbaik dari pola di atas bisa dilihat pada pengembangan potensi dukuh Wotawati, Pucung, Girisubo, Gunungkidul. Pokja masuk dan mengidentifikasi potensi dukuh yang terletak di lembah Bengawan Solo Purba ini pada pertengahan 2022. Potensi yang dimiliki memang unik dan lengkap, mulai lanskap alam, seni tradisi, upacara adat, spiritual, wisata, sejarah dan kuliner serta kohesi sosial masyarakat yang terjaga. Setelah diolah dan didiskusikan, termasuk presentasi ke Badan Kesbangpol dan Paniradya, akselerasi program pun disepakati. Miliaran rupiah dana BKK turun dan kini Wotawati mengalami transformasi sosial budaya menjadi destinasi berkarakter Majapahit yang viral. Wota-

wati menjadi gerbang Yogyakarta paling selatan berbatas Wonogiri. Puluhan desa (kalurahan) telah difasilitasi pengembangan potensinya oleh Pokja Ketahanan Ekonomi, tetapi dinamikanya berlainan.

Apresiasi Kemendagri atas eksistensi dan kinerja Pokja Ketahanan Ekonomi bukan isapan jempol belaka. Ada dokumen, pencapaian tahap demi tahap dan kontekstualisasi visi dengan program sehingga berniat untuk dijadikan template dan digerakkan secara nasional. Lebih dari sekadar tim atau panitia, Pokja memang menjadi jangka yang bisa menemukan potensi, generator yang mampu mengakselerasi, sekaligus rumah yang nyaman dijadikan tempat bermusyawarah. Dari proses itu, muncul ide, konsep, gagasan, program dan target pencapaian sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing desa. Pendekatan pembangunan ini perlu diapresiasi dan dilanjutkan agar kita bisa mengukur dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam kerangka kontekstualisasi keistimewaan Yogyakarta.

Beberapa Agenda Pokja 2025

Bercermin dari sejumlah fakta dan pencapaian di atas, eksistensi Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY bisa memainkan peran strategis dalam membantu mewujudkan visi Gubernur DIY 2022-2027. Reformasi Kalurahan menjadi keniscayaan mengingat keberadaan potensi desa yang belum maksimal dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Peran lurah tetap vital, keterlibatan masyarakat harus terukur. Dibentuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil di-

harapkan bisa lebih menstimulasi dan mengakselerasi program-program yang terkait keistimewaan Yogyakarta.

Indeks Harmoni Indonesia (IhaI) yang dicapai Kota Yogyakarta perlu dielaborasi dan dijadikan barometer wilayah lain di Yogyakarta. Indeks yang diukur dari tingkat harmoni dan kerukunan antarkelompok sosial, budaya dan agama ini bisa meningkat jika potensi yang dimiliki masyarakat bisa diberdayakan sesuai karakternya. Indeks itu juga bisa dijadikan alat untuk memetakan wilayah mana yang perlu mendapat perhatian melalui serangkaian program pendampingan dan pemberdayaan.

Jika merujuk visi Gubernur yang menarik perhatian ke kawasan selatan, maka fokus Pokja di tahun ke empat kehadirannya adalah bagaimana mengidentifikasi potensi, pemetaan kemiskinan dan merekomendasikan solusi. Semakin terbukanya akses jalan di kawasan selatan perlu menjadi perhatian agar penduduk tetap nyaman dan merasa aman menjadi tuan rumah di wilayah sendiri. Dengan begitu, keistimewaan Yogyakarta semakin dirasakan warganya. (*)

*)**Wahjudi Djaja SS MPd, Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY.**

Pojok KR

Pj Bupati Kulonprogo mengingatkan: Jangan kerja asal-asalan.
- **Jangan juga asal bapak senang.**

DPR minta RTM, Lansia dan UMK bisa akses LPG 3 Kg.
- **Tapi jangan pura-pura miskin.**

Presiden pilih 20 Februari 2025 pelantikan Kepala Daerah.
- **Kepala daerah ditunggu melaksanakan janji masa kampanye.**

Berabe